

Edisi 30 / VIII
WACANA



Perempuan & *Politik Pangan*



Menggugat Peran
Perempuan Pedesaan :
Antara Ketahanan Pangan,
Ekonomi Desa dan Politik
Lokal

Pangan dan Perempuan
Pedesaan : Antara Belenggu
Perdagangan Global dan
Marginalisasi Peran

Perempuan dan Politik Lokal

think globally act locally

Perempuan dan Politik Pangan

Sejarah menunjukkan bahwa perempuan di negeri ini selama berabad-abad belum sepenuhnya menjadi manusia. Mereka menjadi obyek kekuasaan dan korban hegemoni patriarki. Di jaman kerajaan perempuan sepenuhnya menjadi “teman belakang” lelaki dan tak jarang menjadi obyek kekerasan dan seksual dari pejabat atau penguasa kerajaan. Mereka tak memiliki hak memilih termasuk, kadang, hak hidup. Demikian halnya perempuan di jaman penjajahan asing tak lebih baik nasibnya dari jaman kerajaan. Selain menjadi obyek seksualitas, mereka juga menjadi obyek kekuasaan lain. Partisipasi perempuan di ruang publik hampir tidak ada. Dicatat memang beberapa nama perempuan pejuang dalam sejarah kemerdekaan. Namun, jumlahnya dibandingkan dengan total jumlah perempuan negeri ini adalah sangat sedikit.

Dalam tahun-tahun kemerdekaan dan terutama dalam masa orde baru, nasib kaum perempuan juga masih belum banyak berubah. Memang, perempuan mulai diakui untuk memperoleh pendidikan namun dalam banyak aspek yang lain, keputusan dan partisipasi mereka masih sangat dikendalikan oleh kaum lelaki. Di era orde baru bahkan, banyak tercatat gejala pelemahan peran perempuan melalui berbagai program pembangunan. Sebagai contoh program KB yang menjadikan perempuan obyek tanpa bisa memilih. Di pedesaan “KB-isasi” ini bahkan disertai dengan koersi.

Di sector pertanian, peran perempuan juga termarginalisir seiring dengan modernisasi revolusi hijau. Penemuan mesin perontok gabah, traktor dan sebagainya menjadi penanda semakin tergesernya peran perempuan oleh pekerja laki-laki. Dalam hal upah pun, perempuan menerima bagian yang lebih rendah dari lelaki. Factor budaya dan kepercayaan juga diakui sebagai factor penghambat bagi keterlibatan perempuan yang lebih banyak di sector public.

Padahal perempuan pedesaan memegang peranan penting dalam pertanian yang juga sebagai bentuk kegiatan ekonomi keluarga pedesaan. Kondisi perempuan pedesaan secara umum masih berpendidikan rendah, dengan tingkat kesehatan reproduksi yang buruk serta tingkat perekonomian minim. Partisipasi perempuan pedesaan dalam usaha pertanian sebagai kegiatan ekonomi keluarga dan pedesaan tidak bisa dianggap remeh, mulai dari proses produksi pangan sampai pasca panen, serta pengelolaan konsumsi pangan keluarga. Perempuan dari segi peranan dan curahan waktu kerja lebih banyak dibanding laki-laki dalam bidang usaha pertanian dan pengelolaan konsumsi pangan keluarga, tapi saat pengambilan keputusan usaha produksi, pengelolaan modal ekonomi dan konsumsi pangan keluarga ternyata lebih banyak diambil pihak laki-laki.

Perempuan berada dalam cengkraman kuatnya paradigma budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Budaya ini sudah kuat mengakar, bukan tidak mungkin menghilangkan tetapi memang tidak mudah. Maka proses proaktif berkelanjutan untuk membongkar paradigma tersebut menjadi agenda yang harus terus digulirkan **W**

salam dari Kami

Kini, setelah reformasi terjadi di negeri ini, setelah kemajuan globalisasi teknologi dan informasi melanda, sejauh manakah nasib perempuan, khususnya di pedesaan ini telah berubah? Sejauh mana mereka bisa mulai terlibat dalam berbagai aktivitas dan pengambilan keputusan public dalam skala yang relevan (lokal-nasional)? Dalam sector ekonomi, pertanian (pangan) dan politik lokal apakah terjadi pergeseran positif kearah partisipasi perempuan yang lebih besar di dalamnya? Ataukah partisipasi mereka masih relative sama dengan jaman sebelum reformasi? Apa indicator terjadinya perubahan tersebut (positif dan negative)? Bagaimana fakta-fakta ini terlihat di lapangan? Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan pedesaan kedepan dalam sector-sektor tersebut?

ELSPPAT melakukan diskusi terbatas untuk memahami persoalan di atas. Wacana ELSPPAT edisi ini menurunkan hasil diskusi tersebut dalam 4 tulisan yang hendak mengupas mengenai persoalan dan peran perempuan, khususnya di pedesaan. Ada tulisan narasumber yang masing-masing membidik peran perempuan tersebut dari perspektif politik pangan, ekonomi rakyat dan politik local. Sebelumnya saripati diskusi ELSPPAT mengenai topik di atas juga disajikan sebagai sajian dan dinamika pikiran yang terjadi selama diskusi. Selain itu ada berbagai tulisan pelengkap dari lapangan.

Akhirnya, selamat membaca dan tetap berpikir kritis

Redaksi

daftar isi

- 4 Menggugah Peran Perempuan Pedesaan : Antara Ketahanan Pangan, Ekonomi Desa dan Politik Lokal
- 11 Pangan dan Perempuan Pedesaan : Antara Belenggu Perdagangan Global dan Marginalisasi Peran
- 17 Perempuan dan Politik Lokal
- 23 Perempuan Pedesaan Membangun Ekonomi : Catatan dari Lapangan
- 28 Leuit : Kearifan Lokal dalam Ketahanan Pangan
- 31 Dilema Gandum

WACANA diterbitkan oleh ELSPPAT sejak Maret 1996 untuk mempertukarkan gagasan atau refleksi pengalaman sambil tetap berpikir global tanpa meninggalkan kenyataan di lapangan.

Redaksi mengundang Anda untuk mengirimkan tulisan yang berkaitan dengan hasil refleksi kegiatan lapangan, kajian tentang kebijakan pembangunan, alternatif pemecahan masalah dan gagasan lain yang segar dan orisinal tentang pertanian berkelanjutan, pemberdayaan petani dan perempuan

Redaksi Indro Surono, Any Sulityowati, Gandi Wasana, Arif Miharja **Tata letak** Anton Waspo **Distribusi** Yuningsih, Usman
Alamat Redaksi

Jl. Kalasan No 15 Perum Cimangu Permai I
Bogor 16310 **Telp/fax** 0251 – 323 089

Email : elsppat@elsppat.or.id

Alamat Surat PO BOX 2026 Bogor Timur 16020
Wacana dapat juga diakses di www.elsppat.or.id

Menggugah Peran Perempuan Pedesaan :

Antara Ketahanan Pangan, Ekonomi Desa dan Politik Lokal



Prolog

Simaklah data yang dikumpulkan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) tentang kebutuhan pangan nasional yang dipenuhi dari impor: mulai dari tahun 1996 - 2003, beras impor rata-rata 2,8 juta ton/th, gula impor 1,6 jutaton/th, impor jagung 1,2 juta ton/th, kedele impor 0,8 jutaton/th, daging sapi setara 450 ribu ekor. Lalu bandingkan data saat ini kepemilikan lahan petani di P. Jawa hanya tinggal sekitar 0,2 Ha dan luar Jawa tinggal sekitar 0,8 Ha, serta disinyalir tingkat alih fungsi lahan ke non-pertanian rata-rata 100 ribu Ha/th. Apa relevansi impor pangan dengan kepemilikan lahan petani?

Pemahaman yang bisa dibangun adalah pesatnya peralihan lahan pertanian ke non-pertanian akan semakin mempersempit kepemilikan lahan petani. Lahan pertanian yang sempit akan menghasilkan volume produk pertanian yang sedikit pula. Akibatnya pilihan yang logis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional adalah dengan mengimpor pangan. Lantas apakah hanya masalah peralihan lahan saja yang menjadi kambing hitam dari impor pangan ? Sebenarnya alih fungsi lahan tidak menjadi indikator tunggal karena faktanya pada beberapa sentra pangan masih mengalami surplus pangan seperti di Karawang, yakni

sekitar 200-300 ribu ton beras pada tahun 2003. Selain Karawang masih ada Purwakarta, Subang, Indramayu dan Pamanukan. Andai surplus beras setiap sentra beras dikumpulkan minimal 100 ribu ton. maka seharusnya tahun 2003 BULOG tidak perlu impor beras. Akar masalah impor pangan yang signifikan sebenarnya adalah masalah perdagangan bebas (fairtrade).

Perdagangan Bebas yang tidak Adil

Isu perdagangan bebas yang sedang dan terus digelindingkan oleh WTO saat ini sudah hampir merambah ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu ranah yang beririsan langsung dengan masalah pangan adalah Agreement on Agriculture (AoA). Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha pertanian merupakan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Karena pangan merupakan salah satu hak asasi suatu warganegara, maka sudah sepantasnya negara berkewajiban menjamin hak asasi tersebut. Perdagangan bebas sebenarnya ingin mengambil peran negara tersebut untuk diserahkan pada mekanisme pasar. Jelas kedua kepentingan tersebut berbeda, pangan secara nasional perlu diproteksi negara, sedangkan perdagangan bebas berusaha mengkomersialkan pangan antar negara. Realita perdagangan bebas saat ini

juga masih banyak kecurangan yang dibuat terutama negara-negara maju. Mereka menjual produk ekspornya dengan harga yang lebih murah daripada produk yang dijual di dalam negeri. Hal ini menunjukkan masih adanya subsidi pertanian dari pemerintah negara maju yang besar. Politik 'dua muka' dijalankan AS dalam perdagangan bebas: satu sisi menyerukan perlunya penghapusan subsidi dan penurunan tarif bea masuk produk pangan impor, di sisi lain mereka tetap mempertahankan subsidi pertaniannya sendiri.

Ekses Perdagangan Bebas bagi Kedaulatan Pangan

Perdagangan bebas menjadi ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan pangan suatu negara dan memiliki dampak negatif bagi komunitas pedesaan. Secara konseptual kedaulatan pangan adalah pengakuan bagi hak komunitas dan negara dalam pengelolaan sumber pangan yang ada di lokal mulai dari proses produksi, pendistribusian dan konsumsi kebutuhan pangannya sendiri. Tapi dengan perdagangan bebas rangkaian proses tersebut dapat diceraiberaikan, dimana produk pangan Indonesia dapat didistribusikan dan dikonsumsi di luar negeri demikian juga sebaliknya.

Ketika produksi pangan nasional sedikit dan permintaan pangan domestik tinggi, tetap dimungkinkan pangan kita didistribusikan dan dikonsumsi di luar negeri (karena tingginya permintaan internasional). Akibatnya akan timbul kelangkaan pangan di dalam negeri dan membumbungnya harga pangan domestik. Sebaliknya saat produksi pangan melimpah dan

permintaan kebutuhan pangan komunitas rendah, pemerintah tidak bisa menolak masuknya produk pangan impor. Inilah ilustrasi pasar bebas. Petani Indonesia akan menjadi korban akibat merosotnya harga pangan.

Banjirnya produk impor hingga di pedesaan dengan harga yang murah dianggap menguntungkan konsumen. Secara logika ekonomi cukup rasional mereka memilih produk pangan impor. Namun hal ini dapat menjadi boomerang ketika banyak individu di seluruh negara mulai lebih suka mengkonsumsi pangan impor. Akibatnya akan makin meningkatkan jumlah produk pangan impor dan meminggirkan pangan lokal di pasaran. Devisa negara juga tersedot akibat untuk menutupi kebutuhan pangan impor. Akhirnya efek mengerucut dengan semakin memiskinkan petani dan membuat komunitas dan negara tergantung terhadap produk pangan impor.

Kebijakan Pertanian Nasional yang Semrawut
Bicara masalah kebijakan pertanian nasional pasti akan mengingatkan romantisme masa Orde Baru dengan Revolusi Hijau-nya. Kebijakan ini sebenarnya sudah cukup komprehensif mendukung petani dan menjaga produksi pangan karena berhasil mencukupinya segala jenis fasilitas produksi (bibit unggul, saluran irigasi, kredit usaha, subsidi bulog) dengan sistem komando dan ideologisasi Bimas, Panca Usaha Tani, dan pengendalian hama terpadu (PHT). Tapi sayangnya hal itu didasari oleh kepentingan kuat rezim militer Orde Baru agar dapat terus berkuasa. Kerangka pikir yang dipakai adalah adanya pangan murah dan produksi pangan yang banyak akan membuat

rakyat diam dan tidak bergejolak sehingga pemerintah mudah mengontrol kehidupan masyarakat. Selain itu kebijakan pertanian Revolusi Hijau memiliki dampak negatif yang berkepanjangan bagi individu petani, perempuan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan. Satu segi positif dari kebijakan pangan era Orba adalah pengusaha pangan sendiri (swasembada pangan) serta melarang impor pangan.

Kebijakan swasembada tersebut berubah total saat orde reformasi, seiring masuknya sistem liberalisasi pertanian dan perdagangan bebas ala WTO. Kesepakatan Pertanian WTO menghendaki pencabutan subsidi pertanian, penghapusan tarif bea masuk impor, dan pelarangan monopoli impor pangan Bulog. Akibatnya petani lokal berlahan sempit dibiarkan bertarung bebas tanpa proteksi apapun dari negara dengan petani luar negeri yang berlahan luas dan sudah maju teknologinya.

Perubahan kebijakan pertanian nasional yang drastis ini seharusnya disikapi selektif dan dilakukan secara bertahap tidak serta merta berubah total. Sejak era ini mulai mengalir produk pangan impor secara besar-besaran. Kerangka berpikir pemerintah (baca: Departemen Pertanian) bahwa kebijakan pertanian Indonesia akan diarahkan ke sistem pertanian efisiensi (*efficiency agriculture*) dengan mengurangi jumlah petani agar petani menjadi tangguh dengan pengelolaan teknologi pertanian canggih seperti negara maju melalui program konsolidasi lahan (*corporate farming*). Kebijakan industri mengasumsikan dengan menggalakkan investasi mampu mentransformasikan tenaga kerja pertanian ke sector

industri ini. Tapi realitanya keadaan tidak demikian, ketika pertanian efisiensi mulai diterapkan dan tenaga kerja pertanian banyak tak terpakai, ketika mereka melakukan urbanisasi ke kota ternyata industri di kota menerapkan industri padat modal bukan padat karya.

Akibatnya mereka lari ke sektor informal perkotaan. Sistem pertanian efisiensi inipun belum dapat menjawab masalah tenaga pertanian yang tidak mampu lagi dialihkan ke industri. Jelas sekarang sebenarnya akar masalahnya adalah pemerintah yang tidak punya ketegasan arah kebijakan pertanian dan arah politik industri nasional yang akan diusung.

Partisipasi Perempuan Pedesaan dalam Belenggu Patriarki

Muncul pertanyaan yang menggelitik benak, lalu apa yang dapat diperbuat perempuan pedesaan menyikapi kondisi global dan nasional yang terjadi di atas? Saat ini jumlah penduduk perempuan secara nasional lebih dari 51 persen dari total penduduk Indonesia. Bahkan data FAO th. 2000 menyebutkan perempuan Indonesia yang bekerja dan tergantung pada sektor pertanian sekitar 50 % yang nota bene masih banyak dilakukan di pedesaan. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa hampir separuh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian adalah perempuan, dimana kegiatan pertanian yang banyak dilakukan di pedesaan.

Artinya perempuan pedesaan memegang peranan penting dalam pertanian yang juga sebagai bentuk kegiatan ekonomi keluarga pedesaan. Kondisi perempuan pedesaan saat ini

umumnya masih berpendidikan rendah, kesehatan reproduksi buruk, dan tingkat perekonomian minim. Saat inipun kesempatan perempuan pedesaan dalam keluarga dan masyarakat pedesaan masih sangat minim dan kurang dilibatkan dalam segala bidang kehidupan seperti usaha pertanian, pengelolaan pangan keluarga, pengembangan ekonomi pedesaan, kancah politik lokal dan juga masih sangat kecil. Partisipasi perempuan pedesaan dalam usaha pertanian sebagai kegiatan ekonomi keluarga dan pedesaan tidak bisa dianggap remeh, mulai dari proses produksi pangan sampai pasca panen, serta pengelolaan konsumsi pangan keluarga.

Memang tenaga lelaki lebih banyak tercurah pada kegiatan pertanian seperti mengolah lahan, mencangkul dll, tetapi sebenarnya curahan waktu perempuanlah yang menyita banyak waktu, ditambah dengan kerja domestik rumah tangga. Perempuan dari segi peranan dan curahan waktu kerja lebih banyak dibanding laki-laki dalam bidang usaha pertanian dan pengelolaan konsumsi pangan keluarga, tapi saat pengambilan keputusan usaha produksi, pengelolaan modal ekonomi dan konsumsi pangan keluarga ternyata lebih banyak diambil pihak laki-laki. Inilah ketimpangan gender yang terjadi di pedesaan.

Partisipasi perempuan pedesaan dalam pengembangan perekonomian keluarga dan pedesaan sering tidak mendapat ruang. Sulit bagi perempuan memperoleh akses terhadap permodalan/ kredit dari pemerintah local atau perbankan lokal. Padahal pengalaman ELSPAT menunjukkan ternyata hanya bermodal tekad yang kuat dan kepercayaan

ternyata perempuan pedesaan mampu mengelola kredit mikro untuk mengembangkan perekonomian keluarga dan desanya. Meski memunculkan "beban ganda" bagi perempuan masih ada, namun peluang akses kredit bagi perempuan secara signifikan mampu meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi dan pengambilan keputusan di tingkat keluarga.

Demikian juga perempuan pedesaan seringkali tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam politik komunitas lokal pedesaan. Contoh kasus pada kawasan Halimun Bogor, jumlah penduduk perempuan pedesaan lebih separuhnya dari jumlah total penduduk, tapi ironisnya tidak ada perempuan yang terlibat dalam BPD atau aparat pedesaan, sehingga tidak ada kepentingan perempuan yang diakomodir dalam kebijakan publik lokal dan keputusan kebijakan lokal banyak diambil laki-laki dan untuk laki-laki juga. Padahal sebenarnya kepentingan politis perempuan sangat spesifik dan berbeda dengan kepentingan laki-laki. Kenapa sampai terjadi proses kemandegan partisipasi perempuan pedesaan mulai tingkat individu, keluarga, komunitas lokal bahkan nasional?

Hal ini dapat dipahami karena masih mengakar kuatnya paradigma budaya patriarki di masyarakat Indonesia. Belenggu budaya patriarki ada sejak manusia diciptakan. Memang tidak mudah menghilangkannya serta memerlukan proses proaktif berkelanjutan untuk membongkar paradigma tersebut.

Membongkar Paradigma Patriarki = Membuka Partisipasi Perempuan

Upaya yang perlu dilakukan perempuan pedesaan untuk membongkar paradigma patriarki di masyarakat, agar dapat membuka jalan bagi partisipasi aktif perempuan pedesaan dalam berbagai bidang kehidupan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi beban ganda antara lain pendidikan kritis adil gender mulai dari politik individu dalam keluarga. Pendidikan kritis adil gender sadar dan mampu mampu menegosiasi dengan keluarganya (anak, suami, mertua dll) dalam pembagian kerja keluarga sehari-hari, agar kelak jika perempuan ada kegiatan pertemuan kelompok bisa mengikutinya. Kedua, bila ternyata beban ganda tetap terjadi, maka perlu prioritas penguatan kesadaran perempuan agar terlibat penyadaran aktif ke suaminya.

Memang tidak dipungkiri adanya segregasi (penyimpangan kecil proses) dan kadang ada keengganan lelaki untuk mendiskusikan masalah tersebut. Upaya selanjutnya untuk meningkatkan dan memperluas partisipasi aktif perempuan adalah proaktif mengikuti perkembangan dinamika lokal seperti mencatat jadwal kegiatan politik lokal, berpartisipasi aktif dalam rapat desa, pemilihan kepala desa, rencana pembangunan infrastruktur desa, dll. Strategi selanjutnya dengan melakukan gerakan bersama penyadaran peralihan secara kelompok dengan kelompok masyarakat lain. Selain itu diperlukan peningkatan intensitas diskusi informal tentang kebutuhan spesifik perempuan di tingkat kumpulan kelompok kecil dan tokoh kunci masyarakat. Alternatif strategi yang perlu juga dengan melakukan pendekatan

informal ke pengambil kebijakan penting secara langsung atau lewat orang dekatnya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan.

Dilema Peran Perempuan Pedesaan : Pengelola Ekonomi dan Pangan Keluarga

Peningkatan partisipasi perempuan pedesaan akan berdampak positif pada pengelolaan ekonomi keluarga baik urusan produktif maupun domestik. Perempuan pedesaan yang menjadi sasaran kredit mikro tentu akan ikut menentukan pemanfaatan kredit dan cara menjalankan usaha yang akan dijalankan bersama keluarga. Apalagi ditambah secara karakter perempuan memiliki sifat lebih teliti dan hemat.

Demikian juga saat kondisi keuangan keluarga terbatas, perempuan pun akan mencari alternatif pengeluaran domestik keluarga seminim mungkin agar kebutuhan keluarga dapat tercukupi dan ada sisa keuangan untuk tabungan / pendidikan. Hal ini menunjukkan perempuan merupakan manajer keuangan keluarga yang handal dan tangguh. Peningkatan partisipasi perempuan pedesaan juga berdampak positif dalam pengelolaan pangan keluarga.

Di atas telah disebut salah satu pengeluaran domestik keluarga adalah masalah pangan. Pada keluarga pedesaan yang masih subsisten mungkin tidak terlalu bermasalah, karena mereka biasa menyisihkan hasil pertanian sebagai cadangan pangan keluarga. Masalah besar timbul pada keluarga pedesaan yang sudah konsumtif dengan produk luar komunitasnya, karena meski mereka produksi sendiri pangan tersebut, tapi ironisnya mereka

membeli produk pangan yang mereka produksi sendiri dari luar. Hal ini dapat dipahami karena sudah mengakarnya sistem ekonomi uang sehingga jadi bumerang.

Upaya yang dilakukan perempuan pedesaan dengan membuat pangan lokal sendiri agar mengurangi pengeluaran uang keluarga. Perempuan pedesaan akan menghadapi dilema dengan perannya sebagai pengelola ekonomi dan pangan keluarga saat mereka dihadapkan pada masalah nasional yaitu membanjirnya pangan impor yang murah, bentuknya menarik dan rasanya enak. Kenapa harus pusing? Jelas, perempuan berperan sebagai pengelola ekonomi dan pangan keluarga akan berhemat dengan mendapatkan pangan yang murah dan enak dan pilihannya adalah produk impor. Bila keputusan ini diambil oleh seluruh perempuan pedesaan maka akan terjadi efek domino yang ujungnya menyengsarakan petani yang tak lain komunitas mereka juga. Lalu bagaimana ?

Pangan : Masalah Bersama Komunitas dan Negara

Pangan adalah masalah fundamental bagi manusia, oleh karena itu pada berbagai negara masalah pangan memerlukan intervensi negara untuk mengatur dan memroteksinya, bila diserahkan pada mekanisme pasar akan terjadi ketidakadilan dan kesengsaraan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada pembagian tugas dan kerjasama antara komunitas dan negara, sedangkan perempuan pedesaan harus menempatkan diri sebagai salah satu unsur komunitas. Tugas masyarakat berperan dalam memproduksi dengan input yang mengurangi

dari luar, mengontrol distribusi dan konsumsi pangan sendiri dan tidak tergantung dari luar.

Gerakan ini harus dilakukan bersama oleh komunitas paling tidak pada beberapa komoditas penting harus diselamatkan dalam arti dapat memberi bermanfaat dan bergulir di komunitas itu serta menjadi produk khas. Tugas negara memproteksi berkembangnya sistem produksi, distribusi dan konsumsi pangan di tingkat lokal. Hal tersebut perlu dilakukan pada daerah yang memiliki keanekaragaman hayati untuk mengupayakan meningkatkan nilai tambah dari sumber pangan lokal agar dapat bergulir di masyarakat. Kecuali pada beberapa daerah yang hanya memiliki satu produk pangan (beras) agak sulit dilakukan dan tidak dapat dipertukarkan dengan produk lain.

Proses pengambilan keputusan dimulai pada tingkat komunitas, bila mengambil pilihan pangan murah akan mempunyai multiplier effect terhadap pendapatan rumah tangga atau memilih pangan sedikit lebih mahal, tapi dapat memberikan manfaat bagi komunitas desa sekitar. Hal ini merupakan pilihan komunitas dan memerlukan konsensi bersama komunitas untuk menentukan dan negara ada berfungsi untuk melindungi hal-hal yang tumbuh di masyarakat.

Upaya Yang Praktis Perlu Dilakukan

Upaya praktis yang dilakukan oleh kelompok perempuan pedesaan dengan melakukan usaha pengolahan pangan lokal, meski ternyata pilihannya bahan bakunya dari produk impor, tetapi karena tidak ada lagi pilihan yang lain maka terpaksa dipakai. Sehingga komunitas tidak perlu merasa bersalah dikarenakan

tiadanya pilihan lain. Lain halnya bila di dalam komunitas disepakati bersama untuk menolak bahan baku dan hasil produk impor.

Mata rantai pemilihan konsumsi pangan keluarga cenderung diputuskan secara personal ternyata lebih banyak berdampak pada perdagangan. Pilihan pangan yang banyak dikonsumsi maka pangan tersebutlah yang akan banyak diperdagangkan di pasaran, maka akan meningkatkan volume produk, meningkatkan volume bahan produk impor dan membuat produk pangan lokal. Hal ini sangat rumit dan sulit dipecahkan karena sebenarnya tidak sekedar rantai dan tidak mudah diputuskan secara personal. Upaya pengurangan ketergantungan produk pangan impor yang paling mendasar perlu kesadaran pengurangan komponen impor di tingkat individu. Upaya selanjutnya dapat dilakukan dengan pengendalian nafsu konsumsi pangan impor dan membuat alternatif pilihan konsumsi pangan dari pangan lokal.

Upaya menghindari tekanan pangan impor terhadap pola konsumsi lokal hanya lewat pengendalian nafsu konsumsi lebih berat, karena seiring dengan akumulasi pilihan individu

dan merasakan akan merubah pola konsumsi dan rasa (taste) individu secara drastis. Tapi harus dikombinasikan dengan membuat pangan lokal alternatif dimulai konteks lokal. Selain itu dengan pendataan pekarangan kosong yang dapat ditanami dan dijadikan buffer pangan konsumsi lokal bahkan mungkin bila lebih dapat dikomersialkan untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

Meski strategi dan metodologi dapat berbeda, tapi setidaknya yang paling logis dan realistis konsep kedaulatan pangan harus dilakukan untuk menentukan pangan yang akan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara sendiri. Masalah kedaulatan pangan di tingkat komunitas perlu memperhitungkan aktor, potensi, sumberdaya yang lain yang ada di komunitas. Selain itu perlu berdiskusi dengan pengambil keputusan lokal agar dapat dipetakan dengan baik sumberdaya alam yang tersedia sebagai daya dukung bagi kehidupan di komunitas. Sehingga ketika dilakukan penataan produksi, didistribusi dan konsumsi pangan akan dikembangkan pada konteks kawasan untuk membangun sistem pangan komunitas secara menyeluruh **W** (*Gandi)



Pertanian masa depan adalah pertanian berkelanjutan
yang menjaga keseimbangan lingkungan

www.elsppat.or.id

Pangan dan Perempuan Pedesaan

Antara Belenggu Perdagangan Global dan Marginalisasi Peran

oleh

David Ardhiar²

Di berbagai negara produsen pangan di dunia, perempuan memiliki peranan penting dalam proses produksi pangan. Namun demikian persoalan perempuan seringkali kurang diperhitungkan dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Perempuan seringkali tidak 'dihitung' dalam berbagai kebijakan pembangunan dan lebih sering menjadi pelengkap penderita dan penanggung beban kebijakan pembangunan yang keliru. Untuk itu persoalan perempuan dalam kaitannya dengan sektor pertanian dan pangan, merupakan hal yang penting untuk didiskusikan.



Peran dan Posisi Perempuan di Sektor Pertanian dan Produksi Pangan

Peranan perempuan pedesaan dalam pertanian dan produksi pangan selalu relevan untuk didiskusikan. Hal tersebut tidak hanya dilihat dari sisi persoalan kultural, dimana kaum perempuan cenderung terpinggirkan dalam arus modernisasi di sektor pertanian, namun juga dari realitas bahwa perempuan memegang peran yang penting dalam produksi pangan. Di sektor pertanian, perempuan pedesaan cenderung memiliki alokasi waktu kerja lebih besar dibandingkan dengan laki laki.

Walaupun distribusi kerja perempuan bervariasi tergantung karakteristik bangsa, budaya dan situasinya, namun pada umumnya peranan perempuan pedesaan sangat vital. Selain terlibat dalam kerja pertanian (publik), perempuan juga

harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, seperti mengurus anak, memasak dan mengelola kegiatan rumah tangga lainnya. Secara kuantitatif jumlah perempuan yang terlibat di sektor pertanian meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari FAO³, jumlah tenaga kerja perempuan dalam sektor pertanian mengalami peningkatan hampir 4 kali lipat dari tahun 1960 sebanyak 7,43 juta menjadi 20,82 juta pada tahun 2000.

Dilihat dari total tenaga kerja perempuan di Indonesia pada tahun 2000 yang berjumlah 41,41 juta, sebanyak 50,28 % nya bekerja di sektor pertanian. Jika angka ini benar, maka keterlibatan perempuan di sektor pertanian tidak bisa dianggap remeh. Banyak studi mengenai dampak modernisasi pertanian (revolusi hijau) yang berdampak negatif pada kaum perempuan. Studi yang dilakukan Jarnop dan Oxfam GB

(2002)⁴ secara khusus mengkaji bagaimana dampak krisis ekonomi dan trend liberalisasi perdagangan terhadap situasi ketahanan pangan pada tingkat lokal.

Salah satu temuan dari studi menunjukkan bahwa cost yang ditanggung akibat krisis ekonomi di pedesaan lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Sepanjang krisis ekonomi periode 1998-2001, Di Dusun Sukawijaya, Kabupaten Kerawang terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja wanita (TKW) dibanding masa sebelumnya.

Artinya perempuan didorong menjadi *copping mechanism agent* untuk ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu terjadi peningkatan kerja kerja tambahan untuk perempuan pedesaan dalam menambah nafkah dengan cara berdagang keliling, menjadi pembantu rumah tangga dan penurunan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan terutama untuk perempuan dan anak anak. Di dusun Cincing, Boyolali kesulitan ekonomi akibat krisis membuat para laki laki bermigrasi ke kota untuk mencari tambahan pendapatan, dan kerja kerja fisik di pertanian harus ditanggung oleh perempuan.

Situasi Pangan di Indonesia : Belenggu Liberalisasi Perdagangan Global

Landasan kebijakan pangan nasional selama ini bersumber pada argumen bahwa untuk mencukupi pangan rakyat, diperlukan ketersediaan pangan (beras) yang melimpah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada masa Orde Baru, hal tersebut diletakkan

dalam kerangka pembangunan lima tahunan, dimana pertanian menempati posisi penting.

Politik pangan Orde Baru menekankan pada swasembada beras. Hal tersebut dibangun secara komprehensif dengan dukungan kredit, subsidi, teknologi, pembangunan sarana dan prasarana serta institusi yang diimplementasikan dengan sistem komando (top-down). Pada fase ini teknologi Revolusi Hijau merupakan pilar utama untuk menggenjot produktivitas padi. Upaya ini tercapai tahun 1984 dengan teraihnya swasembada beras. Namun, segera setelah itu yang terjadi justru peningkatan impor beras dari tahun ke tahun.

Menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru, rezim ini mencoba melengkapi strategi intensifikasi produksi dengan ekstensifikasi melalui pencetakan sawah baru di Pulau Kalimantan seperti yang kita kenal dengan Program Lahan Gambut Sejuta Hektar. Walaupun menuai badai kritik akibat indikasi KKN dan merusak lingkungan, namun dari sisi landasan berpikir tidak berubah yaitu bahwa pangan harus dicukupi secara mandiri oleh produksi dalam negeri.

Sejak era reformasi tahun 1998, politik pangan Indonesia memasuki situasi yang sama sekali berubah. Situasi reformasi, demokratisasi serta desentralisasi membuat berbagai kebijakan pangan berada dalam masa transisi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pada saat yang sama, terjadi proses "accelerated liberalization" oleh IMF terhadap pemerintah RI, sehingga kebijakan pangan nasional kemudian disusun atas dasar

kesepakatan dalam letter of intent (LoI) dengan IMF.

Pada tahun itu muncul kebijakan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan bersamaan dengan penurunan tarif impor beras bahkan mencapai 0 % pada bulan September 1998. Instrumen pengendali harga beras, seperti Bulog menjadi tidak efektif berjalan karena adanya kebijakan untuk membuka secara bebas bagi pihak swasta untuk mengimpor beras. Hal ini mengakibatkan liberalisasi sektor pertanian menjadi lebih cepat dilakukan, bahkan dari kesepakatan multilateral seperti WTO, AFTA dan NAFTA. Dalam kondisi tersebut, maka kebijakan pangan kehilangan komprehensi-fitasnya, berbagai perangkat perlindungan petani telah dicabut.

Sejak saat itu pangan impor membanjiri pasar nasional dan menekan harga produk pangan domestik. Sampai saat ini situasi pangan di Indonesia semakin terpuruk, dimana pada periode tahun 1996-2003 Indonesia telah mengimpor bahan pangan dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya (lihat tabel).

Belenggu liberalisasi pangan global, telah mengungkung tidak saja arah dan substansi kebijakan namun juga landasan berpikir para pengambil kebijakan. Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pertanian mengembangkan konsep Ketahanan Pangan sebagai pilar kebijakan pangan nasional. Ketahanan Pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Dari sisi substansi konsep Ketahanan Pangan diatas memiliki kelemahan mendasar, terutama menyangkut dimensi hak pelaku produk di dalam hal ini petani. Ketahanan pangan lebih memperhitungkan ketersediaan pangan, namun tidak mempersoalkan bagaimana pangan tersebut disediakan dan oleh siapa. Bahkan WTO mengartikan ketahanan pangan sebagai ketersediaan pangan di pasar. Karenanya impor pangan bukan sesuatu yang tabu sejauh ketersediaan pangan masyarakat terpenuhi.

Wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menunjukkan hal yang mengejutkan, dimana dinyatakan bahwa Kabupaten Karawang mengalami surplus produksi antara 200.000-300.000 ton per tahun yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan jumlah impor beras oleh Bulog pada tahun 2003, yaitu 300.000 ton. Sungguh ironis ketika ada surplus produksi tetapi pemerintah tetap mengimpor beras.

Dalam konteks tersebut maka keterpurukan pangan di Indonesia, disebabkan oleh interaksi

Jenis Bahan Pangan Utama	Jumlah impor rata rata/tahun
Beras	2,83 juta ton
Gula	1,6 juta ton
Jagung	1,2 juta ton
Gaplek	0,9 juta ton
Kedelai	0,8 juta ton
Kacang Tanah	0,8 juta ton
Kacang Hijau	0,3 juta ton
Sayuran	256 ribu ton
Bawang putih	174 ribu ton
Buah buahan	167 ribu ton
Daging Sapi	Setara dengan 450.000 ekor sapi
Susu dan produk olahannya	99 ribu ton

Sumber: KRKP, diolah dari berbagai sumber

antar tekanan liberalisasi perdagangan dengan hambatan struktural yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan pada masa transisi. Tantangan akan semakin berat ketika persoalan persoalan klasik yang ada yang belum terselesaikan seperti ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian, akses terhadap informasi dan sumber pendanaan yang rendah, dan persoalan kemiskinan di pedesaan.

Dampak Pada Tingkat Lokal dan Posisi Perempuan

Gelombang liberalisasi sektor pertanian dan pangan, serta ketidakjelasan keberpihakan kebijakan pangan nasional memberikan multiplier effect pada tingkat lokal. Insentif dan nilai tukar dari produk pertanian menjadi semakin menurun. Berbagai persoalan klasik, seperti rendahnya akses terhadap lahan, sumber pendanaan dan layanan layanan publik terkait pertanian, ditambah lagi oleh situasi kering dan banjir yang ekstrim membuat keluarga tani terutama petani kecil semakin terpuruk. Yang nampak hanya, sebuah upaya atau strategi untuk mengatasi kesulitan hidup yang dialami (copping mechanism).

Fenomena urbanisasi merupakan salah satu akibat yang muncul dari situasi tersebut diatas, terutama adalah perempuan dan anak muda pedesaan. Di dusun Cikuntul Karawang, bahkan menjadi TKW merupakan peluang yang diimpikan oleh para perempuan, karena lebih menjanjikan untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Di desa Cikuntul, kabupaten Karawang, tahun 1999 jumlah perempuan yang menjadi TKW adalah 200

orang, dan pada tahun 2004 ini jumlahnya lebih dari dua kali lipat yaitu lebih dari 500 orang.

Salah satu juga fenomena yang menarik disimak di desa Cikuntul adalah pasca 1998, mulai banyaknya perempuan yang melakukan "ngeprik" yaitu mengumpulkan sisa sisa padi pada jerami setelah masa panen. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga dan indikasi konkrit adanya gejala pemiskinan (sejak dulu *ngeprik* identik dengan aktivitas orang miskin).

Studi Yayasan Nastari, Yayasan Peduli Konservasi Alam Indonesia dan Biodiversity Conservation Indonesia dengan masyarakat di Dusun Cisarua, Desa Cipeutey, Sukabumi menunjukkan bahwa perempuan lebih responsif dalam mengatasi persoalan pangan keluarga dan upaya peningkatan pendapatan dibandingkan laki-laki.

Perempuan juga menghabiskan waktu lebih banyak untuk jenis pekerjaan yang lebih beragam dibanding dengan laki laki. Dari sisi kebijakan pangan, berbagai program yang dilakukan pemerintah disadari maupun tidak selalu dalam skema "untuk laki laki". Berbagai skema bantuan seperti program kredit dan pendanaan usaha tani lebih banyak untuk laki laki, demikian halnya peningkatan kapasitas petani seperti pendidikan dan pelatihan juga lebih diorientasikan pada laki laki dan kurang melibatkan peran perempuan.

Dari paparan tersebut diatas maka bisa dilihat bahwa selama ini perempuan merupakan pilar dalam keluarga tani, bahkan menjadi penopang

hidup dikala krisis atau guncangan menerpa ekonomi keluarga. Namun demikian lemahnya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun di masyarakat, mengakibatkan terjadinya peningkatan beban perempuan di sektor pertanian.

Menuju Kedaulatan Pangan : Peluang dan Tantangan Peran Perempuan

Situasi keterpurukan pangan nasional, penderitaan petani dan khususnya perempuan melahirkan konsep Kedaulatan Pangan di kalangan LSM dan pemerhati petani dan pertanian. Kedaulatan Pangan diartikan sebagai hak setiap orang, kelompok masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif serta dalam menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing.

Konsep ini berbeda dengan Ketahanan Pangan yang tidak mepedulikan dari mana pangan diproduksi dan hak rakyat atas sumberdaya produktif. Dalam konsep kedaulatan pangan, hak rakyat tidak terbatas pada akses untuk memperoleh pangan tetapi juga hak untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan. Dalam konsep ini perempuan memiliki hak yang sama dengan laki laki dalam pengambilan keputusan untuk produksi pangan dan akses yang seimbang dalam pemenuhan pangan dan kontrol terhadap sumber daya produktif.

Kedaulatan pangan bukanlah konsep baru. Presiden Soekarno dalam pidato peletakan

batu pertama berdirinya Institut Pertanian Bogor pada tahun 1964 mengemukakan pentingnya meletakkan politik pangan negara secara berdikari dan atas dasar kemampuan sendiri. Pada tataran internasional pun berbagai gerakan rakyat telah mengukung Food Sovereignty sebagai satu upaya radikal untuk melepaskan diri dari belenggu liberalisasi perdagangan pangan global yang dikuasai oleh kekuatan modal dari perusahaan trans nasional.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) merupakan salah satu jaringan masyarakat sipil yang peduli dan bergerak dalam perwujudan kedaulatan pangan ini. KRKP memandang kedaulatan pangan juga sebagai sebuah peluang bagi perempuan pedesaan untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan dalam sistem pangan mulai dari produksi, distribusi maupun konsumsi. Namun demikian gerakan ini masih sebatas pada titik titik kecil dalam masyarakat, belum menjadi gerakan yang masif untuk mempengaruhi kebijakan pangan nasional seperti halnya gerakan untuk mendukung keterwakilan perempuan dalam politik dan lembaga perwakilan.

Selain itu pertanian organik merupakan alternatif solusi juga yang memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih banyak terlibat dalam pertanian secara lebih substansial. Meski realitasnya keterlibatan perempuan dalam organisasi tani atau pedesaan masih minim, dengan berbagai perundangan yang memberi porsi lebih pada peran perempuan perlu terus didorong, khususnya di pedesaan.

Keterbukaan informasi dan hak bersuara bagi masyarakat dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung juga telah memberikan kontribusi bagi kesadaran perempuan akan posisi dan perannya. Munculnya beberapa kader kader penggerak lokal dari kaum perempuan di pedesaan merupakan fenomena positif untuk lebih mendorong posisi perempuan untuk lebih memiliki peran dalam pengambilan keputusan pada tingkat keluarga dan komunitas.

Tantangan terbesar dari perempuan adalah justru di persoalan budaya, yang membatasi peran mereka pada sektor domestik serta kerja kerja pertanian pelengkap dari laki laki. Marginalisasi peran dalam produksi pangan, dan proses “peng-ibu rumahtangga-an” perempuan masih menghegemoni sebagian besar masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Persoalan kebudayaan hanya bisa

diatasi dengan perubahan kultural, yang hanya bisa dicapai melalui proses pendidikan yang sistematis dalam jangka panjang. Hal ini memerlukan kerja kerja yang serius bagi berbagai pihak yang peduli pada persoalan perempuan terutama terkait dengan sektor pertanian dan produksi pangan **W**

catatan kaki

1. Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas Elsppat “Peranan Perempuan Pedesaan dalam Membangun Ketahanan Pangan, Pembangunan Pedesaan dan Partisipasi Politik Lokal, Bogor, 24 Februari 2004
2. Sekretaris Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), aktivis pada Yayasan Nastari Bogor, email : krkp@indo.net.id ; vied_ardhian@yahoo.com
3. FAOSTAT DATA, diakses tanggal 10 Februari 2004.
4. Studi Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Situasi Ketahanan Pangan Lokal di 3 Desa di Jawa oleh Jarnop dan Oxfam GB

Tema WACANA ELSPAT tahun 2004

Edisi/terbit	Tema	Topik/Isu
31 21 Juni 2004	Pertanian Organik	<ul style="list-style-type: none"> • PO dan kemandirian petani • Sisi ekonomis – ekologis PO • Kebijakan PO di Indonesia
32 15 Sept 2004	Reforma Agraria	<ul style="list-style-type: none"> • Problema Hak Atas tanah bagi Petani • Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Ketidakjelasan Kebijakan Agraria
33 20 Des 2004	Hak – Hak Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Telaah tentang Hak Ekonomi – Sosial Budaya • Perlindungan Hak Petani

Redaksi menerima tulisan sesuai topik di atas. Tulisan yang dimuat akan diedit seperlunya tanpa mengubah substansi tulisan. Batas waktu penerimaan naskah hingga minggu pertama bulan terbit setiap edisi.

Perempuan dan Politik Lokal¹

Oleh

Nani Saptarini²

Keadilan relasi antara perempuan – laki-laki dalam pengambilan keputusan sudah lama dibicarakan. Sejak Konferensi dunia ke-I tentang Perempuan tahun 1975, yang menghasilkan pernyataan: “women have a vital role to play in the promotion of peace in all spheres of life: in family, the community, the nation and the world. Women must participate equally with men in the decision making processes which help to promote peace at all levels”, menunjukkan bahwa betapa besar keprihatinan dunia tentang perlunya kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level menuju kedamaian dan keberlanjutan dunia.



Perhatian yang besar ini, ternyata sulit untuk diwujudkan. Lebih dari 20 tahun semenjak konferensi, dari jumlah penduduk Indonesia yang 51%nya (109.14 juta jiwa) adalah perempuan, hanya 9% saja yang duduk di badan legislatif dan eksekutif. Secara kuantitas perempuan di Indonesia merupakan aset yang sangat potensial dan strategis, namun ironisnya dari jumlah tersebut mereka seolah tidak berdaya dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik yang dapat menjamin keadilan bagi perempuan.

Meski dalam pasal 65 UU Pemilu yang baru menyebutkan keterwakilan (kuota) perempuan minimal 30% di legislatif merupakan upaya mempersempit ruang diskriminasi dan marginalisasi perempuan dalam penentuan kebijakan publik, namun kenyataannya masih menjadi pro dan kontra, baik di kalangan laki-

laki maupun perempuan itu sendiri. Banyak yang menyangsikan, siapkah perempuan memasuki dunia politik ?

Perjuangan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang merupakan hal penting untuk dilakukan. Banyak penelitian tentang peran dan posisi social perempuan menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan sudah terjadi sejak perempuan tersebut masih bayi dan berlanjut hingga dewasa. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki disosialisasikan melalui budaya, adat istiadat, dan persepsi agama sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Sehingga, berbicara tentang partisipasi politik perempuan baik dari level lokal-nasional-maupun dunia, tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam kehidupan ini.

Kebijakan Pemerintah : (Nampak) Mendukung Partisipasi Politik Perempuan

Banyak kebijakan nasional jelas menuliskan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. UUD 1945, pasal 27³ dan 28⁴ memberikan peluang bagi setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Seperti yang telah disampaikan juga oleh presiden pertama RI, Ir. Soekarno dalam kelahiran Pancasila sebagai berikut :

“Cara kita menggambarkan sila perikemanusiaan adalah di atas perisai yang dikalungkan kepada lehernya Garuda Indonesia, adalah rantai yang bergelang-gelang tiada putus-putusnya, persegi bundar- persegi bundar. Sebagai lambang tiada putus-putusnya perhubungan antara perempuan dan laki-laki. Persegi lambang perempuan, bundar lambang laki-laki. Demikian juga bendera kita merah putih, bukan sekadar merah lambang keberanian, putih lambang kesucian. Merah-Putih juga adalah lambang terjadinya manusia, sebagaimana surya dan candra, di mana matahari dilambungkan dengan warna merah dan bulan warna putih, demikian juga merah adalah lambang perempuan dan putih adalah lambang laki-laki.”

Sangat jelas dalam pemikiran Soekarno bahwa perempuan dan laki-laki harus bersama-sama, bekerja sama untuk mengelola pemerintahan, membawa ini mewujudkan cita-citanya yang luhur bagi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Prinsip kesetaraan gender juga terjamin dalam UU No.68/1956 tentang Hak Politik Perempuan dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui UU No.7/1984. Dalam konvensi tersebut, partisipasi politik perempuan diatur dalam pasal 7 yang antara lain memuat :

1. jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih
2. jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
3. berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan
4. perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan terjaminnya hak perempuan untuk memperoleh kemudahan dan tindakan khusus dalam mencapai kesetaraan dan keadilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik, ditegaskan lagi dalam TAP MPR No.VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi kepada Presiden untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif sebanyak 30%. Bahkan, untuk memperkuat kebijakan ini diterbitkan UU No.12/2003 tentang Pemilu, dimana dalam pasal 65 menyatakan adanya “keterwakilan perempuan minimal 30% di

legislatif". Hal ini semakin melengkapi upaya para pengambil kebijakan dalam membuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dalam kancah politik Indonesia, mulai tingkat lokal sampai nasional.

Walaupun penerbitan UU No.12/2003 menimbulkan pro-kontra, baik di kalangan laki-laki dan perempuan, namun undang-undang tersebut merupakan peluang bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi politik. Sebenarnya semangat yang ingin disampaikan dalam UU bukan untuk menuntut pemberian atau belas kasihan kepada perempuan, melainkan menuntut pengembalian hak perempuan atas partisipasi politik, seperti yang tertera dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sehingga, kebijakan politik 30% representatif perempuan dalam parlemen merupakan payung hukum yang bisa digunakan untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat posisi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan setengah dari jumlah penduduk Indonesia saat ini.

Kebijakan di atas semakin diperkuat dengan terbitnya UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah, dimana kelembagaan lokal dan adat yang selama lebih dari 20 tahun telah dibungkam dan dibenamkan melalui UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa diberi peluang untuk berkembang kembali. Masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat memotong birokrasi partisipasi politik lokal, yang sebelumnya sangat terpusat (sentralistik) menjadi desentralistik. Munculnya kebijakan parlemen desa dalam UU otonomi daerah memberikan harapan akan munculnya

penguatan dan memperluas ruang politik yang bagi perempuan di tingkat lokal.

Fakta Riil: Sulit Menerapkan Keadilan Gender

Namun demikian, walaupun secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi politik, tetapi dalam kenyataan situasi yang ada memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan tetap marjinal, kurang terwakili di bidang-bidang dimana keputusan dan kebijaksanaan yang penting dibuat.

Ada dua hal yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi, pertama karena dalam masyarakat yang masih bersifat patriarkis seperti di Indonesia, perempuan tidak dianggap layak masuk ke sektor publik. Akibat kondisi ini, sulit bagi perempuan memasuki posisi-posisi politik yang strategis, baik di tingkat desa, kabupaten/kota, apalagi tingkat nasional.

Kedua, karena adanya ketidak-selarasan keyakinan dan pemikiran dari pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Seperti contohnya dalam keyakinan dan pemikiran dari UU No.68/1956 tentang Hak Politik Perempuan yang menempatkan perwakilan perempuan adalah orang yang dapat memahami kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi perempuan (sebagian besar rakyat Indonesia).

Namun dalam perjalannya wakil rakyat perempuan dituntut lebih untuk memiliki

keahlian (karakteristik psikologi) tertentu, karena dunia politik menuntut agresivitas, kekuatan, kemandirian, kompetisi, rasionalitas dan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sulit. Pola-pola pemikiran yang menghasilkan pemahaman demikian inipun, sangat erat kaitannya dengan pola pikir patriarki yang berkembang di Indonesia.

Studi yang dilakukan RMI di 4 desa dampingan di daerah Halimun, Jawa Barat, menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik desa. Keterlibatan perempuan baik dalam aparat desa, RW/RK, RT dan BPD masih sangat rendah yakni kurang dari 8% (1-2 orang saja). Bahkan tidak ada perempuan yang menjadi pengurus RT/RW (Lihat tabel).

Minimnya jumlah perwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, menyebabkan banyak kebijakan umum yang dapat mempengaruhi kesejahteraan kaum perempuan desa masih dipegang dan dikontrol oleh laki-laki. Parahnya, di tingkat lokal -- dengan norma dan budaya yang menempatkan posisi laki-laki sangat superior-- tidak sepenuhnya memahami kebutuhan spesifik yang khas perempuan.

Banyak hal yang dianggap remeh oleh kaum laki-laki, tetapi sangat dibutuhkan oleh perempuan. Soal ketersediaan akan air bersih misalnya, yang merupakan masalah semua orang, akan tetapi perempuan akan lebih dalam

Desa		Apart Desa	RW / RK	RT	BPD
Malasari	♀ %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	♂ %	12 (100)	8 (100)	22 (100)	20 (100)
Sirnaresmi	♀ %	1 (6,3)	0 (0)	0 (0)	2 (11)
	♂ %	15 (93,7)	7 (100)	14 (100)	16 (88,8)
Mekarsari	♀ %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	♂ %	15 (100)	8 (100)	24 (100)	20 (100)
Kiarasari	♀ %	1 (7,29)	0 (0)	0 (0)	1 (5,26)
	♂ %	12 (92,3)		7 (100)	116 (100)

Ket. ♀ : jumlah perempuan ♂ : jumlah laki - laki

lagi merasakan pentingnya penyediaan air bersih di kampung mereka, karena mereka yang bertugas mengambil air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mencuci, dan sebagainya. Seringkali pemerintah local mengabaikan persoalan air bersih ini. Jika melihat kasus di atas, apa yang ada dalam benak kita? Mestinya dengan jumlah penduduk perempuan lebih kurang 50%nya di 4 desa tersebut, seharusnya kaum perempuan disana dapat terlibat dalam menentukan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Tapi yang terjadi kaum perempuan desa justru lebih sering diabaikan.

Mengapa kira-kira hal ini terjadi? Apakah karena perempuan-perempuan desa memang sudah percaya dan puas telah diwakili oleh kaum laki-laki? Ataukah lantaran tidak adanya kesempatan yang sama antara perempuan dan

laki-laki dalam ruang public? Atau masih ada keterbatasan perempuan dalam mengkampanyekan diri? Tentunya alasan-alasan tersebut tidak pernah berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan sehingga sangat kompleks ketika kita ingin berbicara tentang partisipasi perempuan desa/lokal dalam politik.

Ada beberapa alasan yang menghambat wanita dalam partisipasi politik, seperti faktor ekonomi, relasi kekuasaan, mitos, budaya, stereotype, dan segregasi gender dalam pekerjaan yang kemudian bermuara pada budaya patriarki. Perilaku dan struktur masyarakat patriarki dengan sengaja menempatkan perempuan pada posisi yang serba terbatas. Seperti adanya kesan (budaya) yang muncul di masyarakat bahwa bidang politik merupakan 'wilayah' laki-laki (public domain), sementara perempuan hanya ditempatkan dalam peran domestik, sebagai istri atau ibu rumah tangga. Situasi ini yang menyebabkan terpinggirkannya perempuan di bidang politik.

Padahal apabila kita lihat lebih dalam lagi, 'arena politik' tidak hanya terjadi ruang publik saja, tetapi juga terjadi di tingkat individu. Ketika seorang perempuan sudah dapat mengambil keputusan sendiri dengan dasar perempuan tersebut sudah memahami resiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung atas keputusan tersebut, disitulah mulai terjadi ruang-ruang politik perempuan. Bayangkan apabila semua perempuan Indonesia dapat bersikap seperti demikian, maka ruang partisipasi perempuan dalam politik public semakin terbuka. Dan dengan sendirinya kuota

30% anggota parlemen perempuan menjadi tidak diragukan atau dipertanyakan kembali.

Faktor penghambat lain adalah kurangnya aset yang dimiliki perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan karena tolok ukur kemampuan masih diukur dari tingkat pendidikan formal. Di pedesaan masih banyak perempuan yang rendah pendidikannya atau bahkan tidak pernah mengecap pendidikan formal sama sekali.

Selain itu, institusi politik yang ada saat ini sangat didominasi oleh laki-laki (sangat maskulin). Situasi ini menyebabkan perempuan lokal menjadi tidak tertarik untuk memasukinya dan sulit menembusnya. Selanjutnya dapat dibayangkan, akan menjadi lebih berat bagi kaum perempuan dalam memasuki ruang politik lokal dibandingkan dengan laki-laki. Selain harus berkompetisi dalam hal kemampuan, kaum perempuan masih harus menjalankan beban ganda atas pekerjaan domestic sebagaimana dikonstruksikan secara sosial sejak lama.

Sesungguhnya politik lokal juga sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan di tingkat individu (rumah tangga) yang kemudian berdampak pada pengambilan keputusan secara kolektif. Dalam konteks perempuan, proses pengambilan keputusan ditingkat individu sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah menempatkan peran-peran tertentu (kodrat) pada perempuan dan adanya perbedaan antara perempuan-laki-laki. Sehingga pada tingkat individupun, kaum perempuan sudah tidak bebas dalam

menentukan keputusan. Tidak heran jika keterhambatan partisipasi politik perempuan di tingkat komunitas menjadi terhambat.

Strategi Ke depan

Jika perubahan dalam politik lokal perempuan ingin terjadi, sejatinya perubahan dalam pengambilan keputusan di tingkat individu perempuan harus menjadi perhatian. Melalui peningkatan pendidikan politik bagi kaum perempuan lokal menjadi pilihan strategi yang perlu dilakukan segera. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, bukan pendidikan politik praktis yang dibutuhkan perempuan, tetapi pendidikan politik kritis yang dapat memperkuat dalam proses pengambilan keputusan perempuan.

Untuk menumbuhkan kesadaran “peminggiran perempuan dalam percaturan politik” diperlukan pendidikan politik yang adil gender. Perspektif ini dengan sendirinya akan membuka ruang-ruang bagi berkembangnya beragam cara pikir serta tindakan yang lebih memahami kebutuhan dan adil bagi perempuan, yang pada akhirnya akan mendorong munculnya inovasi dan perubahan-perubahan fundamental dalam masyarakat.

Selanjutnya perlu didorong kaum perempuan untuk bersedia mengajukan diri sebagai kandidat pemimpin public. Karena tanpa partisipasi penuh dari perempuan yang sudah memiliki pemikiran kritis dan berspektif keadilan gender, cita-cita untuk kemajuan perempuan secara kolektif tidak dapat tercapai

Terakhir, peningkatan pekerjaan dan perbaikan sistem hukum sebagai prakondisi untuk menciptakan partisipasi yang adil di bidang politik dan pengambilan keputusan perlu menjadi perhatian untuk dilakukan **W**

Sumber

Anonim. 1997. Perempuan dan pemberdayaan : Kumpulan karangan untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu Saparinah Sadli. Program Studi Kajian Wanita-Program Pasca Sarjana UI. Jakarta.

Anonim, 2003. Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan. Jurnal Analisis Sosial Vol.8 No.2, Oktober 2003

Prof. Dr. Suhartono, dkk. 2001. Politik Lokal: Parlemen Desa, Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah. Lapera.

Catatan kaki

1. Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas Elspat “Peranan Perempuan Pedesaan dalam Membangun Ketahanan Pangan, Pembangunan Pedesaan dan Partisipasi Politik Lokal, Bogor, 24 Februari 2004
2. Staf RMI the Indonesian Institute for Forest and Environment, Bogor
3. ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali
4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Perempuan Pedesaan Membangun Ekonomi: Catatan dari Lapangan

Oleh:

Elfrida Situmorang

ELSPPAT memulai pendampingan kelompok perempuan pedesaan dengan pendekatan mikro kredit untuk pengembangan usaha keluarga. Upaya ini dimulai sejak tahun 1999 dari dua kelompok beranggota sepuluh orang. Dengan menerapkan sistem kredit ala Grameen (modifikasi) dan pelembagaannya secara konsisten, kini kelompok perempuan telah mencapai 19 kelompok dengan anggota hampir 200 orang di lima desa. Lebih jauh para penerima manfaat ini membentuk organisasi bernama Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) yang tidak saja mengelola kredit mikro tetapi juga berbagai aktivitas lain. Pelan tetapi pasti mereka mulai memberi dampak pada pengembangan ekonomi lokal.



Latar Belakang

Pengembangan kredit mikro pertama kali dilakukan di sebuah dusun kecil bernama Geblug, di desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Bogor. Lokasinya tergolong strategis karena jaraknya dekat dengan kota Bogor, kurang lebih 15 Km arah selatan. Penghasilan utama masyarakat pada awalnya adalah dari usaha tani, namun dari tahun ketahun berubah menjadi buruh sector informal, buruh industri dan pedagang. Hal ini disebabkan karena tingginya tingkat penjualan tanah oleh masyarakat setempat ke pihak luar. Fenomena penjualan lahan ini semakin hari semakin besar hingga kini. Faktor pendorong terjadinya pelepasan tanah tersebut antara lain (1) harga jual tanah

semakin tinggi, (2) kuatnya desakan ekonomi keluarga baik untuk usaha produktif maupun biaya-biaya social dan konsumsi. Kecenderungan yang sama terjadi juga di daerah-daerah lain di Kecamatan Cijeruk. Persoalan ini mengakibatkan sumber penghasilan masyarakat dari lahan semakin menurun, sementara untuk mengembangkan usaha alternatif untuk meningkatkan penghasilan keluarga terbentur dengan ketiadaan modal (uang).

Di sisi lain peran perempuan di wilayah ini pada umumnya hanyalah sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan yang rendah, kesehatan yang rendah, kesempatan dan posisi tawar dalam ekonomi yang rendah adalah situasi nyata yang dialami oleh kaum perempuan. Tak jarang pula

dalam pengelolaan keuangan keluarga masih didominasi oleh laki-laki (suami), sementara perempuan (istri) hanya menerima "resiko sehari-hari" (keterbatasan uang untuk kebutuhan sehari-hari). Karena pemilik modal adalah laki-laki maka peran perempuan didalam pengambil keputusan dan dalam menentukan usaha relatif sangat kecil.

Potensi perempuan untuk berperan dalam menyokong ekonomi keluarga sebenarnya relatif besar. Perempuan pedesaan umumnya memiliki ketrampilan dalam memproduksi makanan tradisional atau bahkan mengembangkan usaha. Namun kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh perempuan di pedesaan relatif kecil. Angapan bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki sementara peran perempuan hanyalah mengurus rumah tangga menjadikan perempuan semakin pasrah dalam posisinya dan sepenuhnya bergantung pada suami. Disisi lain keterbatasan modal uang juga salah satu factor kendala perempuan untuk ikut terlibat dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga.

Kondisi inilah yang merupakan salah satu factor pendorong ELSPAT untuk mencoba melakukan program kredit mikro yang murah dan mudah dijangkau. Harapannya dengan memberikan pinjaman modal bergulir, akan dapat membuka peluang usaha atau mengembangkan usaha yang ada. Kredit mikro yang dikembangkan diutamakan untuk perempuan miskin pedesaan. Selanjutnya pendekatan mikro kredit ini juga menjadi salah satu entry point pemberdayaan perempuan yang lebih luas.

Perintisan Kelompok

ELSPAT mulai membangun kelompok perempuan berawal dari 10 orang perempuan. Awalnya sistim yang dibangun belum jelas, tanpa bentuk, dengan satu penekanan utama yakni: yang penting berkelompok. Asumsinya dengan berkelompok akan terbangun rasa kebersamaan, rasa percaya diri mereka, dan sesama perempuan dapat saling menguatkan. Karena sistimnya tidak jelas maka mengakibatkan beberapa hal seperti kelompok kurang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang diterima, pertemuan kelompok tidak berjalan dengan aktif dan tidak ada tambahan pendapatan keluarga serta keberlanjutan program menjadi terancam. Belajar dari kelemahan tersebut, dibuatlah perubahan dengan mendiskusikannya bersama dengan kelompok yang ada.

Sistim yang diberlakukan kemudian adalah modifikasi sistim Grameen Bank. Adapun alasan memilih sistim Grameen Bank ini antara lain adalah: kredit diperuntukkan secara khusus untuk orang miskin, tanggung jawab dari semua anggota (tanggung renteng), aturannya cukup ketat (disiplin, pertemuan mingguan, dsb) dan harus berkelompok. Sebelum calon penerima kredit membentuk kelompok terlebih dahulu harus melalui beberapa tahap :

1. Mengikuti pertemuan awal. Pada tahapan ini dijelaskan secara terbuka sistim yang akan diberlakukan dan siapa sasarannya.
2. Melakukan survey kepada calon penerima kredit (kondisi rumah, keluarga dll). Dalam tahapan ini akan terseleksi calon-calon

penerima sesuai dengan kriteria yang telah disediakan. Bagi anggota yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah dibuat maka dengan otomatis akan gugur.

3. Mengikuti Latihan Wajib Kumpul. Merupakan pelatihan 3 hari tentang organisasi, sistem kredit yang akan diterapkan dsb. bagi mereka yang lulus seleksi. Selama mengikuti pendidikan calon anggota harus selalu hadir. Apabila salah seorang dari jumlah calon anggota tidak mengikuti pelatihan ini maka latihan wajib kumpul diulang dari awal lagi.
4. Pencairan modal secara bergilir. Sistem yang dipakai adalah sistem 2-2-1 yang artinya minggu pertama 2 orang mendapatkan kredit, minggu kedua 2 orang lagi, dan minggu yang ke tiga 1 orang.
5. Pembayaran pinjaman secara rutin. Yang dipakai adalah sistem mencicil setiap minggu dalam pertemuan rutin mingguan selama jangka waktu 6 bulan (jangka kredit). Pada proses ini juga si anggota akan diuji kedisiplinannya baik kehadiran maupun jumlah pengembaliannya. Hal ini akan menentukan jumlah pinjamannya berikutnya yang lebih besar.

Pada awalnya sangatlah sulit mengajak masyarakat terutama kelompok perempuan di desa tersebut untuk berkumpul. Terlebih sistem yang dijalankan bagi masyarakat setempat dianggap cukup rumit dan lama (sekitar 1 bulan). Sehingga, perjalanan pembentukan kelompok sangat lambat setahun pertama (sekitar 20 orang di 2 kampung). Kaum perempuan masih ragu-ragu bahkan takut untuk bergabung dalam

kelompok Hal ini bisa dipahami karena sebelumnya aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan di desa tersebut hanya pengajian, *kondangan* dan pekerjaan rumah tangga. Namun secara perlahan anggota kelompok mulai berkembang berkat peran kelompok perempuan yang sudah menjadi anggota itu sendiri. Partisipasi mereka cukup besar dalam penyebaran informasi dari dusun ke dusun bahkan ke desa-desa tetangga.

Lama kelamaan anggota mulai akrab dengan system yang ada dan makin banyak perempuan yang ingin bergabung dengan kelompok kredit ini. Terlebih setelah mereka mulai melihat dampaknya bagi kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Setelah menerima kredit usaha anggota semakin maju, ada penambahan pendapatan dan dengan berkelompok mereka semakin dikuatkan dan percaya diri. Karena sebelumnya memang kesempatan itu sangat kurang. Apabila ada program yang sama di lingkungan setempat, yang berhak memperolehnya adalah kepala rumah tangga (laki-laki). Mereka mulai mencoba membangun usaha-usaha kecil lewat ketrampilan yang mereka miliki.

Semangat yang mereka miliki untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga membuat mereka menjadi kreatif. Dan untuk lebih meningkatkan kegiatan dan solidaritas anggota seluruh kelompok kredit sepakat membentuk Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) sebagai payung kegiatan perempuan di wilayah ini.

Dampak Program

Ada banyak perubahan dan kemajuan yang dicapai seiring dengan penerimaan kredit bergulir dan berkembangnya organisasi KPM. Kaum perempuan (anggota KPM) ternyata mampu menjadi wirausaha yang handal. Mereka memiliki semangat yang tinggi untuk maju dan adalah pekerja-pekerja yang keras untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengalaman nyata dilapangan seperti kemampuan menyeimbangkan peran dalam rumah tangga sehingga pengambilan keputusan tidak lagi didominasi para suami. Juga bagaimana mereka membangun usaha yang dulunya hanya sebagai pedagang keliling dengan modal yang sangat minim menjadi mampu membangun beberapa jenis usaha kecil lainnya, bahkan sampai mampu membeli tanah. Kalau dulu mereka hanya sebagai buruh penjual makanan kecil, kini malah mempunyai anak buah beberapa orang. Kalau dulu hanya menjajakan dagangan orang lain, berkat kesempatan yang diberikan kini malah memiliki usaha yang cukup mapan. Banyak contoh-contoh keberhasilan lain yang dirasakan oleh mereka. Tentu saja berkat peran kaum perempuan inilah kesejahteraan keluarga mulai dapat dirasakan oleh semua keluarga (suami, anak, orang tua dll).

Dalam suatu pertemuan evaluasi bersama, pengurus dan anggota KPM mengungkapkan keberhasilan dan peluang yang dapat dirasakan melalui program ini, seperti:

1. Secara perlahan ekonomi keluarga semakin meningkat
2. Dapat menciptakan usaha mandiri

3. Tumbuhnya rasa solidaritas diantara sesama anggota
4. Daya kritis kelompok perempuan semakin tumbuh
5. Terbangunnya keswadayaan dari kelompok
6. Mulai terbangun kesadaran bersama di dalam rumah tangga khususnya relasi antara suami dan istri.
7. Peran mereka mulai diakui ditengah-tengah masyarakat sekitarnya
8. Program keuangan ini dapat berkesinambungan
9. Semakin banyak kegiatan dilakukan: pertanian organis, arisan tabungan, kelompok usaha bersama, pelatihan, warung sembako dll.

Tantangan yang dirasakan dalam perjalanan membangun kelompok adalah adanya pro – kontra di tengah tengah masyarakat, terutama kaum ulama. Namun kendala itu dapat diatasi sendiri oleh KPM dengan bertemu langsung para ulama menjelaskan manfaat dan posisi KPM. Mereka menjelaskan bahwa keberadaan kelompok yang mereka bangun adalah kepentingan untuk mereka sebagai perempuan, kepentingan untuk keluarga dan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan kesadaran itulah maka kelompok-kelompok perempuan itu mulai mendapatkan kekuatan untuk menyuarakan suaranya. Pada akhirnya para ulama tersebut dapat memahami keberadaan KPM.

Kendala lain yang terjadi adalah masih ada ditemukan adalah apabila anggota tersebut hanya sebagai penerima kredit dan bukan

sebagai pelaku usaha, adakalanya perempuan hanya dijadikan sebagai juru bayar saja oleh pihak keluarga (suami, anak, orang tua dll). Selain itu, beban perempuan menjadi berganda, disatu sisi dia dapat meningkatkan ekonomi keluarga disisi lain dia juga harus melakukan kerja-kerja rumah tangga.

Keberlanjutan Program

Program pengembangan ekonomi pedesaan yang semula dijalankan oleh ELSPAT, sepenuhnya, secara perlahan dialihkan kepada pengurus KPM. Dalam kurun waktu 2 tahun melalui pendampingan yang intensif mereka kini telah mampu mengelola kredit mikro secara mandiri. Meski mereka hanyalah perempuan-perempuan desa sederhana yang berpendidikan rendah ---yang dulunya hanyalah sebagai perempuan yang pasrah--- ternyata mereka kini menjadi perempuan-perempuan pejuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui program kredit mikro. Jumlah anggota KPM sekarang mencapai 185 orang.

Usaha yang didanai kredit KPM juga semakin beragam mulai dari usaha jasa (dagang), pengolahan makanan, pertanian, hingga

perikanan. Kredit yang diberikan juga tidak mutlak untuk usaha perempuan, tetapi ditekankan sebagai usaha keluarga. Dengan demikian proses pengambilan keputusan dan kesetaraan peran antara suami istri semakin terwujud. Banyak para suami yang diuntungkan dengan kredit yang penerimaannya melalui para istri ini.

KPM sendiri tidak berhenti sebatas mengelola kredit mikro, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggota dan masyarakat sekitar. Beberapa kegiatan yang telah dikembangkan antara demplot pertanian organik, kelompok usaha bersama, tanaman obat keluarga, tanaman dapur hidup, warung sembako, pendidikan baca tulis, dan berbagai pelatihan seperti kesehatan reproduktif, organisasi, pengelolaan usaha dan peka gender. Sekarang KPM telah pula terlibat dalam pembentukan dan penguatan kelompok tani (yang kebanyakan laki-laki) dan aktif dalam kepengurusan paguyuban tani Kabupaten Bogor. Selain itu juga tengah mengembangkan pemasaran desa sehingga produk petani dan usaha lainnya bisa diserap disana dan juga dikunjungi oleh pembeli dari luar **W**

Leuit

Kearifan Lokal dalam Kedaulatan Pangan

Oleh

Arif Miharja

***Leuit** adalah sebutan lokal bagi lumbung penyimpan padi atau gabah hasil panen komunitas petani di Kampung Sarongge, Desa Cisarua, Kecamatan Sukajaya, Bogor. Selama puluhan tahun dan dari generasi ke generasi masyarakat kampung itu masih mempertahankan tradisi menyimpan padi dalam lumbung keluarga baik untuk kepentingan konsumsi maupun benih musim tanam berikutnya. Sistem pertanian yang menempatkan leuit sebagai bagian sitem pangan lokal ini merupakan satu bukti ---di tingkat tertentu--- masih adanya kedaulatan pangan di tingkat komunitas petani.*



Tradisi Agraris di Kampung Sarongge

Kampung Sarongge adalah salah satu kampung di Desa Cisarua. Letaknya di lereng gunung Halimun bagian utara, kurang lebih 40 km arah barat daya Kota Bogor. Untuk mencapainya diperlukan waktu 3-4 jam perjalanan dari kota Bogor. Setelah naik angkutan umum, dilanjutkan dengan naik ojek di jalanan desa nan mendaki dan ditutup dengan jalan kaki sekitar setengah jam.

Kampung Sarongge adalah kampung yang indah. Hamparan sawah dan pepohonan di hutan lindung adalah pemandangan utama. Sungai mengalirkan air jernih. Aneka burung beterbangan. Udara yang sejuk dan penduduk yang ramah. Di kampung inilah selama setahun

terakhir ELSPAT belajar bersama komunitas yang ada.

Mayoritas warga kampung Sarongge hidup dari pertanian, khususnya padi sawah. Tidak ada satupun keluarga yang tidak menanam padi. Praktek pertanian padi ini telah berkembang secara turun-temurun. Dari generasi ke generasi yang kemudian membentuk sistem pengetahuan dan tradisi bertani tersendiri, seperti menjaga keberagaman jenis benih, persiapan lahan, persiapan benih, penanaman, perawatan, pemanenan, penyimpanan, sampai pada pola konsumsi dan distribusinya. Semua rangkaian proses budidaya itu dikawal dengan berbagai aturan dan ritual. Pertanian padi adalah sistem pengetahuan yang hidup dan menghidupi pemilikinya.

Hampir semua produksi padi di Sarongge dikonsumsi sendiri oleh masyarakat. Budaya menjual padi atau gabah hampir tidak dikenal di sana. Beras merupakan merupakan pokok mereka sejak lama dan ada semacam tabu untuk menjualnya. Benih padi yang ditanam juga merupakan benih lokal yang mereka hasilkan sendiri. Masih ada sekitar 29 varietas padi lokal yang dikembangkan. Pola tanam dan teknologi budidaya masih sangat sederhana dan mengandalkan tenaga kerja manusia. Hanya saja, imbas revolusi hijau tetap nyata di kampung ini yang ditunjukkan dengan kuatnya ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia.

Leuit dan Ketahanan Pangan

Hampir setiap rumah penduduk memiliki tempat penyimpanan hasil panen padi secara khusus. Tempat penyimpanan padi ini ada yang berupa Peti atau berupa lumbung padi (*leuit*) yang besarnya beragam, tergantung pada kapasitas produksi padi. Di kampung Sarongge, sebagai contoh terdapat 14 *Leuit* yang tersebar di dalam perkampungan maupun di lokasi persawahan. Peti biasanya merupakan tempat menyimpan hasil panen keluarga yang hampir setiap rumah memilikinya. Sementara *leuit* lebih bersifat komunal atau dimiliki oleh keluarga dengan kapasitas produksi yang besar. Di dalam *leuit* inilah padi hasil panen mereka disimpan sampai bertahun – tahun lamanya.

Saat ini, padi di dalam *leuit* ada yang berumur 10 tahun. Umur padi yang sudah lama ini biasanya terjadi karena padi yang lama tertumpuk oleh padi yang baru dipanen begitu seterusnya hingga tidak sempat dikonsumsi. Masyarakat di sana menyebut padi tua ini sebagai *indung pare*

(tumbal). *Indung pare* ini sengaja dibiarkan terus di tumpukan bagian bawah dan tidak boleh dimakan selagi masih ada padi yang baru panen yang terletak di atasnya. Menyimpan padi di *leuit* dan khususnya padi tua mengindikasikan bahwa keluarga atau masyarakat diharuskan mempunyai tabungan atau cadangan padi (pangan), baik dalam setiap musim panen maupun keadaan paceklik. Selain itu melalui penyimpanan ini dapat meningkatkan inisiatif masyarakat agar selalu mempunyai ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Sekarang di kampung Sarongge sudah ada perubahan cara pandang di mana padi yang sudah lama atau tua tadi boleh digunakan untuk konsumsi pada saat-saat khusus, misalnya hajatan atau ritual. Tetapi sebagai makanan pokok sehari-hari tetap jarang digunakan karena kualitasnya telah menurun, rasanya sudah pahit, *bear*, *murag tina sapuan* (sudah lepas dari tangkai padi), rasanya tidak enak dan warnanyapun sudah berubah. Biasanya padi yang sudah tua ini digunakan untuk membuat kue, misalnya dodol. Namun, walaupun *indung pare* yang dijadikan sebagai tumbal boleh dikonsumsi tetap saja masyarakat harus menggantinya dengan padi baru yang selanjutnya akan menjadi *indung pare* (tumbal) kembali.

Padi di *leuit* atau di peti baik untuk konsumsi baru boleh dilakukan setelah padi disimpan minimal 40 hari lamanya. Intensitas pengambilannya juga dibatasi hanya satu kali dalam satu minggu dalam jumlah ikatan padi yang tetap dan dalam hitungan ganjil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus sudah

punya kesadaran untuk selalu berhemat, dan memiliki standar pangan yang cukup untuk keluarga dalam satu minggu sampai dengan musim panen berikutnya. Dengan demikian berapa jumlah ketersediaan yang diperlukan selama satu musim, penhematan yang harus dibuat senantiasa diketahui oleh masyarakat.

Sistem lumbung pangan sebagai tempat penyimpanan dan persediaan pangan inilah yang masih terus bertahan hingga sekarang. Masyarakat disana tidak pernah kekurangan padi atau pangan. Saat panen mereka menabung padi di lumbung-lumbung, dan saat paceklik mereka memakai tabungan pangan itu. Sehingga ketahanan pangan masyarakat senantiasa terjaga sepanjang waktu.

Ada prosesi ritual yang dilakukan untuk menyimpan padi, yaitu sebelum padi disimpan dalam leuit atau peti didahului dengan upacara membakar kemenyan sambil membaca doa. Setelah itu padi baru dimasukkan kedalam leuit atau peti. Setelah semua selesai dimasukkan lalu dilakukan *rasulan Ngelepkeun* atau *Nitipkeun pare* di leuit atau peti. Yang melakukan proses ini boleh perempuan atau laki-laki asal bisa membaca doa *Ngelepkeun*.

Konservasi Benih Padi

Masyarakat Sarongge biasanya sudah memisahkan terlebih dahulu antara padi yang akan disimpan sebagai pangan di lumbung dengan benih yang akan dipakai dalam musim tanam berikutnya. Biasanya benih padi ini disimpan di dalam rumah dengan cara digantung di atap atau kayu dekat dapur. Padi yang

digunakan untuk benih dipilih secara teliti. Biasanya adalah padi yang berisi dan bulirnya besar, dan umur simpannya paling lama satu tahun. Karena jika sudah lebih dari satu tahun kualitas padi yang dihasilkan tidak memuaskan, seperti benih banyak mati, mudah diserang hama, serta hasilnya tidak akan optimal.

Selain itu padi untuk benih tidak boleh tercampur dengan “pare kolot” (padi yang sudah ada dalam *leuit*). Dalam kepercayaan mereka secara turun temurun, jika padi yang akan dipakai untuk benih tercampur dengan “pare kolot” tidak akan dapat tumbuh. Secara pengetahuan modern memang padi untuk konsumsi memang berbeda dengan untuk benih. Untuk benih biasanya dipilih padi yang sudah matang, bulirnya besar dan bagus serta membutuhkan ruang yang tidak lembab. Penempatan benih di dapur merupakan salah satu cara menghindari kelembaban itu.

Tradisi penyimpanan dan seleksi benih ini masih berjalan hingga sekarang. Dan sejauh ini masyarakat di Sarongge tidak memerlukan lagi benih dari luar karena sudah bisa dicukupi dari hasil mereka sendiri. Masih banyaknya varietas padi lokal juga menunjukkan adanya kepedulian masyarakat Sarongge untuk menjaga dan mengkonservasi keanekaragaman genetic padi. Jika di daerah lain banyak petani sudah tergantung pada benih hibrida, petani Sarongge masih berdaulat atas ebrbagai benih lokal. Dan komunitas disana masih dapat menikmati lezatnya beraneka ragam nasi dari beragam varietas padi local **W**

dilema gandum

Semula di tahun 1974, Indonesia hanya mengimpor 500 000 ton gandum dan pada tahun 1996 telah mencapai 4 juta ton per tahun. Pada tahun 2001 saja dengan nilai pembelian rata – rata seharga US\$ 255 per ton maka Indonesia mengeluarkan uang sebanyak US\$ 1020 juta per tahun untuk membeli Gandum. Nilai ini kurang lebih setara dengan besarnya hutang yang di dapat Indonesia dari CGI (Consultative Group on Indonesia)

Gandum adalah bahan pangan yang tidak tumbuh di Indonesia. Sehingga pengadaanya harus dilakukan hanya dengan satu cara : Impor. Peredaran gandum di Indonesia di Monopoli oleh PT Bogasari Indonesia yang kemudian bergabung dalam satu payung PT Indofood (salah satu produsen mie instan terebesar di Indoensia). Selama seperempat abad monopoli terus dipegang oleh Bogasari, yang menguasai seluruh sektor: impor, menggiling dan membangun pasar mie instan.

Apa Dampaknya ?

1. Jumlah total dollar yang digunakan untuk mengimpor gandum hampir 3 persen dari total APBN Indonesia. Dan sejak tahun 2002 tarif impor gandum adalah 0% . Artinya negara tidak mendapat apa- apa dari usaha mengimpor gandum.
2. Terjadi perubahan pola konsumsi dan selera konsumen di Indonesia. Salah satu produk andalan gandum adalah mie instan. Tingkat konsumsi mie instan di

Tuntutan:

1. Agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi impor gandum secara berkala dan mengenakan tarif impor gandum
2. Agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang lebih pro petani, dengan memberikan subsidi bagi petani subsisten agar mampu bersaing dalam pemasaran mereka
3. Agar negara memenuhi hak sasi kaum perempuan, khususnya perempuan pedesaan yang berurusan secara langsung dengan dunia pertanian, yang selama ini diabaikan, dengan memasukkan suara, kepentingan, pengalaman, pengetahuan, dan keuletakan perempuan ke dalam semua proses inisiatif, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan manfaat kebijakan pertanian
4. Agar para produsen makanan yang biasa memakai gandum sebagai bahan dasar mulai mengantinya dengan bahan produk lokal (atau non-gandum) untuk produksinya
5. Agar seluruh konsumen di Indonesia mulai mengkonsumsi produk-produk non gandum, terutama mulai menolak mengkonsumsi mi instan.

Kampanye ini didukung oleh:

ALAMSI (Aliansi Aktifis Lingkungan Indonesia), dehwatc Indonesia (dwi), Federasi Serikat Perempuan Merdeka - HUSPARI, Forum Perempuan BPD - Deli Sebang, International NGO Forum on Indonesian Development (INGRID), Institut for Civilis, Asosiasi RUSA, Institut Perempuan (IP), Komunitas Aksi Organisasi Perempuan (KAOPO), Komite Independen untuk Pengembangan Kemitraan Struktur (IKOS), Komite Perempuan Indonesia (KPI) sebagai Jaringan, PI, Pengembangan Insentif dan Kebijakan Baru (PIKB), Ruang Nelayan (RN), Serikat Nelayan Jawa Barat (SNJB), Serikat Perempuan Indonesia (SPI) - Deli Sebang, Sustainable Development Education Center (SUSDEC), Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan (YLSKS), Yayasan Tulus Air (YTA), YEM BAWORA.

Alamat kontak: Jl. Pengalagan Selatan 5166, Jakarta 12270, Telp. (021) 794 5285, debwac@yahoo.com, debwac@indonesiata.org

BOIKOT GANDUM dan Produk-produknya

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas produksi gandum di Indonesia didapat dengan melakukan impor. Di tahun 2001 pemerintah mengimpor beras sampai 2,5 juta ton, jagung 1 juta ton, gula 2,1 ton dan kedelai 1,1 juta ton. Sementara untuk gandum Indonesia mengimpor rata-rata 4 juta ton setiap tahunnya. Dengan harga rata-rata 255 US\$ per ton-nya, maka Indonesia harus mengeluarkan 1020 juta US\$ pertahunnya, hanya untuk mendatangkan Gandum. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah utang luar negeri baru yang diminta Indonesia setiap tahunnya kepada CGI (Consultative Group on Indonesia), suatu konsorsium pemberi utang untuk Indonesia.

Peredaran gandum di Indonesia dimonopoli oleh PT. Bogasari Indonesia yang kemudian bergabung dalam satu payung PT. Indofood yang juga memproduksi mi instan. Lainnya Bogasari tidak lepas dari campur tangan Amerika Serikat, ketika di awal tahun 1970-an mengolah impor gandum dari Amerika dalam bendera "pangan untuk perdamaian". Selama seperempat abad monopoli terus dipegang oleh Bogasari, yang menguasai seluruh sektor perindustrian (impor, menggiling, dan membangun pasar mi instan). Akibatnya semua Indonesia di tahun 1974 hanya mengimpor 500 ribu ton gandum, di tahun 1996 telah mencapai 4 juta ton, dengan pengimpor utama dari Australia. Kemudian Bogasari mengambil alih 22 perusahaan mi instan di seluruh Indonesia, sehingga boleh dikata PT. Indofood menguasai hampir 100 persen pangsa pasar mi instan.

Masalahnya apakah kita benar-benar perlu gandum? Gandum adalah bahan pangan yang tidak tumbuh di dalam negeri. Sehingga pengadaan gandum harus dilakukan hanya dengan satu cara: IMPOR.

Indonesia adalah 43 bungkus per kapita per tahun. Perubahannya dapat dilihat dari tabel, dimana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah konsumsinya makin meningkat. Padahal kalori yang didapat dari mie instan lebih rendah dari pada beras, dengan harga yang lebih mahal.

3. Penyesatan lidah konsumen terjadi melalui mis instan. Coba simak siapakah yang disasar oleh iklan mie instan? Hampir semua iklan mie instan menampilkan tokoh perempuan. Perempuan diajarkan untuk menjadi tokoh ideal, symbol penyayang (yang mengukuhkan peran tunggal perempuan sebagai penyayang dan perawat). Tetapi di lain pihak sebagai tokoh yang bertanggungjawab atas kesehatan keluarga. Perempuan dijadikan tokoh mulia sekaligus kambing hitam atas buruknya kesehatan keluarga karena dominasi mie instan.

Tingkat konsumsi per kg/kapita/tahun			
Kelompok pendapatan	1996	1999	Perubahan (%)
Rendah			
Beras	119,2	101,4	-15
Jagung	3,9	4,2	9,0
Ubi Kayu	15,83	18,4	22,2
Mie instan	1,4	1,5	7,0
Sedang			
Beras	115,7	108,7	-6,2
Jagung	2,0	2,4	22,0
Ubi Kayu	10,2	13,0	27,0
Mie instan	2,4	2,1	-13,4
Tinggi			
Beras	110,2	105,6	-4,3
Jagung	1,1	1,3	15,6
Ubi Kayu	7,1	9,8	38,0
Mie instan	4,2	3,6	-13,7

Mie instan adalah produk olahan mie yang telah mengalami proses pemasakan lanjutan, yaitu dikukus dan digoreng atau dikeringkan dengan udara panas, lalu dikemas.

Bahan Tambahan Makanan (BTM) pada mie instan umumnya adalah pengembang adonan, penstabil adonan, pembuat emulsi, pembuat tekstur dan zat pewarna. BTM pada bumbu mie instan umumnya adalah monosodium glutamat (MSG/vetsin/penyedap rasa) dan pemberi rasa. Pemberi rasa inilah yang membuat mie berasa kari ayam, ayam bawang, soto dll. Pada dasarnya ini adalah hasil teknologi rekayasa asam-asam amino protein nabati (umumnya kedelai) hingga didapatkan struktur kimia tertentu yang mirip dengan rasa kari ayam, soto dll.

Disadur dari lembaran kampanye Boikot Gandum dan produk-produknya oleh debtwatch Indonesia versi lengkap dapat diakses di debtwatchindonesia.org atau elsppat.or.id